



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

PERDEBATAN SOEKARNO DENGAN PARA ULAMA TENTANG PERUMUSAN DASAR NEGARA DALAM SIDANG BPUPKI

SKRIPSI



SUMANTRI
NIM 14123141151

**JURUSAN SEJARAH KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKNURJATI CIREBON**

2016 M/1438 H



ABSTRAK

Sumantri. NIM 14123141151. “PERDEBATAN SOEKARNO DENGAN PARA ULAMA TENTANG PERUMUSAN DASAR NEGARA DALAM SIDANG BPUPKI”. Skripsi. Cirebon : Fakultas Adab Dakwah Ushuluddin, Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Agustus 2016.

Dimulai dari perdebatan antara Ir. Soekarno dengan Muh. Natsir yang saat itu mempunyai pemikiran yang berbeda tentang dasar negara. Ketika itu polemik pemikiran Ir. Soekarno yang berkeinginan memisahkan antara agama dan negara, sedangkan Muh. Natsir berkeinginan mendirikan negara nasional yang berdasarkan Islam, karena banyaknya penganut agama Islam di Indonesia. Perbedaan inilah yang memulai perdebatan tentang dasar-dasar negara.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis merasa tertarik dengan perdebatan yang terjadi dalam sidang BPUPKI pada 14 Juli 1945, Soekarno sebagai Ketua Panitia Konstitusi, melaporkan kepada sidang paripurna tiga rancangan Deklarasi Kemerdekaan, Preamble Undang-Undang Dasar dan Batang tubuh Undang-Undang dasar yang terdiri dari 42 pasal yang sangat menarik untuk diteliti. Dimana dalam hal ini dirumuskan dalam pembahasan tentang perdebatan Soekarno dengan Ulama dan proses perdebatan dalam sidang BPUPKI yang terjadi pada saat itu.

Dari perdebatan dalam rangkaian sidang-sidang BPUPKI tersebut penulis menarik kesimpulan, jelas bahwa soal dilematik belum terselesaikan. Pada satu sisi kalangan Islam mengusung Islam sebagai dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI dan ingin melaksanakan seluruh isi syariat Islam yang ada tanpa suatu reformulasi yang tuntas. Di sisi lain, kalangan Islam kebangsaan memiliki pemahaman yang sebaliknya, bahwa urusan negara haruslah dipisahkan dengan urusan agama. Nampaknya, kalangan kebangsaan hanya ingin menempatkan Islam dalam sebuah bungkus ”urusan pribadi” seorang muslim. Perdebatan tentang dasar negara ini telah menggiring para pendiri Republik Indonesia menjalani masa-masa sulit dalam sejarah Indonesia modern.

Kata kunci : Perdebatan Soekarno Dengan Ulama, Dasar Negara.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **PERDEBATAN SOEKARNO DENGAN PARA ULAMA TENTANG PERUMUSAN DASAR NEGARA DALAM SIDANG BPUPKI** oleh **SUMANTRI**, NIM 14123141151 telah dimunaqosahkan pada tanggal 28 September 2016 di hadapan dewan penguji dan dinyatakan lulus.

Skripsi ini telah memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora Islam (S.Hum. I.) pada jurusan Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, 7 Oktober 2016

Panitia Munaqosah	Tanggal	Tanda Tangan
Ketua Jurusan Dedeh Nur Hamidah, M.Ag NIP. 19710404 20112 2 001	3-11-2016	
SeSekretaris Jurusan Zaenal Masduqi, M.Ag. M.A NIP. 19720928 200312 1 003	6-11-2016	
Penguji I Dr. Yayat Suryatna, M.Ag NIP. 19611010198703 1 004	1-11-2016	
Penguji II Aah Syafaah, M.Ag NIP. 19730130200212 2 001	25-10-2016	
Pembimbing I Dr. Anwar Sanusi, M.Ag NIP. 19710501 200003 1 004	26-10-2016	
Pembimbing II Zaenal Masduqi, M.Ag. MA NIP. 19720928 200312 1 003	6-11-2016	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dakwah



Dr. Hajam, M.Ag.

NIP. 19670721 200312 1 002



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Persetujuan	iii
Nota Dinas.....	iv
Pernyataan Otentisitas Skripsi	v
Pengesahan	vi
Riwayat Hidup	vii
Motto	viii
Persembahan	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi	xii
Daftar Lampiran	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masala.....	1
B. Pembatasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pemikiran	9
G. Metode Dan Sumber Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan	11

BAB II KONDISI ANGSA INDONESIA SEBELUM SIDANG BPUPKI

A. Masa Sebelum Sidang BPUPKI	12
B. Terbentuknya Panitia Sembilan	14

BAB III KONSEP NEGARA MENURUT SOEKARNO DAN PARA ULAMA DALAM MERUMUSKAN DASAR NEGARA

A. Konsep Soekarno Tentang Negara.....	18
1. Soekarno	18



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Mohammad Hatta	25
3. Mohammad Yamin	30
B. Konsep Ulama Tentang Negara	31
1. Muhammad Natsir	31
2. Ki Bagoes Hadikusumo	35
3. Abdul Wachid Hasyim	39
4. KH. Abdoel Kahar Moedzakkir	44

BAB IV

HASIL PERDEBATAN SOEKARNO DENGAN ULAMA

A. Proses Perdebatan	49
B. Nama-Nama Yang Berada Dipihak Nasionalis Dan Agamis	65
C. Hasil Perdebatan	66
1. Sidang BPUPKI Pertama	66
2. Sidang BPUPKI Antara Pertama Dan Kedua	67
3. Sidang BPUPKI Kedua (10-16 Juli 1945)	69

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku	73
---------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Topik yang akan dibahas dalam skripsi penulis adalah tentang perdebatan dasar negara. Perdebatan ini pun terjadi dalam merumuskan dasar negara di Indonesia. Adanya perdebatan ini pun membuktikan bahwa beberapa pihak yang menginginkan dasar negara yang diusulkan dapat diterima dan disepakati oleh pihak-pihak yang lainnya. Perdebatan dasar negara ini pun dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada sidang BPUPKI pertama, pertemuan pun diarahkan pada pembahasan tentang dasar negara bila Indonesia merdeka kelak. Banyak sekali perdebatan yang terjadi dalam perumusan dasar negara ini.

Dimulai dari perdebatan antara Ir. Soekarno dengan Moh. Natsir yang saat itu mempunyai pemikiran yang berbeda tentang dasar negara. Ketika itu polemik pemikiran Ir. Soekarno yang berkeinginan memisahkan antara agama dan negara, sedangkan Moh. Natsir berkeinginan mendirikan negara nasional yang berdasarkan Islam, karena banyaknya penganut agama Islam di Indonesia. Perbedaan inilah yang memulai perdebatan tentang dasar-dasar negara.

Pada awalnya Moh. Natsir dan para pengikutnya sudah agak dilegakan dengan munculnya Piagam Jakarta yang memuat penyatuan agama dengan negara yang tertera dalam sila pertama. Kemudian rumusan Piagam Jakarta inilah yang sudah disepakati oleh seluruh wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai sila-sila yang akan tertera di Pancasila.¹

Namun pada saat akan dibacakan pada tanggal 18 Agustus 1945, Ir. Soekarno dipanggil untuk menemui Laksamana Maeda. Saat itu Laksamana Maeda mengutarakan kekhawatirannya tentang penyatuan agama yang tertera pada salah satu sila di rumusan tersebut. Karena, Indonesia terdiri dari banyak agama di dalamnya. Kemudian dalam tempo yang sangat singkat Ir. Soekarno pun

¹ Moh. Hatta, *Menuju Negara Hukum*, (Jakarta Yayasan Idayu 1975)., hlm. 8.



merubah rumusan tersebut. Perubahan inilah yang sedikit mengecewakan harapan kelompok-kelompok Islam. PPKI dan Ir. Soekarno dianggap melakukan kesalahan dengan mementingkan kelompok minoritas (non-islam) dan mengorbankan kepentingan kalangan mayoritas (umat Islam). Rasa tidak puas oleh beberapa kalangan itulah yang memunculkan persoalan baru pada awal kemerdekaan.²

Pada awal kemerdekaan pernah ada usulan untuk namanya *panca dharma*, tetapi dengan tegas Soekarno menyatakan bahwa “Pancasila artinya azas atau dasar, dan di atas dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi”.³ Pidato inilah yang memacu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk membentuk lagi suatu panitia kecil yang terdiri dari sembilan (9) orang untuk mengembangkan berbagai usulan yang masuk mengenai kemerdekaan Indonesia. Kesembilan orang yaitu: Abdul Kahar Muzakir, Wachid Hasyim, Agus Salim dan Abikusno Tjokrosujoso (dari golongan Islam); Soekarno, Moh. Hatta, Muhammad Yamin, Maramis, dan Subardjo (dari golongan nasionalis). Alasan mendasar dibentuknya tim 9 yang diketuai oleh Soekarno itu adalah karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bahkan menimbulkan dua kubu atau faksi yang tetap bersitegang untuk menginginkan prinsip kebangsaan sebagai dasar negara. Perbedaan ini bermuara pada cara pandang dalam memposisikan hubungan negara dan agama. Menurut Prof. Ahmad Syafii Maarif, dari 68 orang anggota BPUPKI, hanya 15 orang saja yang benar-benar bisa mewakili aspirasi politik dan ideologi umat Islam. Anggota BPUPKI di luar 15 orang itu dikatakan bersepakat untuk menolak Islam dijadikan sebagai dasar negara Indonesia. Kebuntuan inilah yang sebetulnya melahirkan panitia sembilan (tim 9) untuk mencari solusi soal dasar negara.

Pekerjaan panitia kecil inilah tersusun suatu naskah pembukaan yang dikenal sebagai *gentlement agreement* di antara para pendukung paham

² *Ibid*, hlm. 9.

³ Safiyudin Sastrawijaya, *Sekitar Pancasila, Proklamasi dan Konstitusi*, (Bandung, 1980), hlm 8-9.



nasionalisme dan pendukung Islam. Kesepakatan inilah yang oleh Moh. Yamin disebut sebagai *Djakarta Charter* yang selanjutnya naskah tersebut dikenal sebagai Piagam Jakarta.⁴ Isi Piagam Jakarta adalah sebagai berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar pada: Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Sebetulnya perdebatan seputar dasar negara Indonesia yang merdeka itu, baik dalam BPUPKI maupun tim 9 bukan mengenai nama dasar negaranya, sebab

⁴Ahmad Mansur Suryanegara, *API Sejarah 2*, (Bandung : PT Grafindo Media Pratama 2010) hlm. 163.

⁵SoeriSoeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005). Hlm. 427-428.



sudah disepakati bersama adalah *pancasila*. Tetapi perdebatan justru terkait pada isi sila-silanya. Perdebatan tersebut justru ditimbulkan oleh perbedaan pendapat dari golongan yang menginginkan agar kelak negara Indonesia adalah negara Islam, tetapi disanggah oleh anggota lain yang berpaham nasionalisme.⁶

Perbedaan ini justru mendapat titik temu lewat rancangan Pembukaan Hukum Dasar (preamble hukum dasar) yang kemudian dilaporkan hasil kerjanya dan diterima secara aklamasi dalam sidang BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Kemudian pada tanggal 22 Juli 1945 ditetapkan sebagai hari terbentuknya Piagam Jakarta. Adapun naskah Piagam Jakarta sebagaimana yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 di atas adalah:

1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. (menurut dasar) Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. (serta dengan mewujudkan suatu) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷

Sejak penetapannya telah disepakati oleh kelompok Islam dan kelompok kebangsaan bahwa negara pancasila bukanlah negara agama, juga bukan negara anti agama, melainkan negara ketuhanan yang memelihara budi pekerti, kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat.

Golongan Islam awalnya menolak, tidak senang dengan usul membangun Indonesia merdeka atas dasar pancasila, tetapi akhirnya dapat menerimanya. Mereka menolak negara anti agama, tetapi dapat menerima negara pancasila yang

⁶ *Ibid*, hlm. 429

⁷ Samsul munir Amin, *sejarah peradaban Islam*, (Jakarta: Amzar, 2010), hlm 410.



berketuhanan, sedangkan golongan kebangsaan negara agama, tidak dapat menerima negara ketuhanan.

Penulis ingin mengutip pidato Soepomo yang juga memperlihatkan perdebatan seputar isi Piagam Jakarta itu, demikian: “Oleh anggota yang terhormat, tuan Moh. Hatta telah diuraikan dengan panjang lebar bahwa negara persatuan di Indonesia hendaknya urusan negara dipisahkan dari urusan agama”. memang di sini terlihat ada dua paham, yaitu paham dari anggota-anggota yang ahli agama yang menginginkan supaya negara Indonesia didirikan sebagai negara Islam. Anjuran lain sebagaimana telah dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta ialah negara persatuan nasional yang memisahkan urusan negara dan urusan Islam. Dengan lain perkataan: bukan negara Islam, apa sebabnya disini penulis menyatakan “bukan negara Islam”? perkataan: negara Islam lain artinya dari pada perkataan “negara berdasar atas cita-cita luhur dari agama Islam”. Apakah perbedaannya akan saya terangkan. Dalam negara yang tersusun sebagai negara Islam, negara tidak bisa dipisahkan dari agama, negara dan agama adalah satu, bersatu padu. Islam sebagaimana tuan-tuan telah mengetahui ialah suatu sistem agama, sosial dan politik yang bersandar atas Alquran sebagai pusat sumber dari segala susunan hidup manusia Islam. Jadi seandainya kita disini mendirikan negara Islam, tantangan pendirian itu akan timbul juga di masyarakat kita dan barangkali Badan Penyelidik inipun akan susah memperbincangkan soal ini. akan tetapi tuan-tuan yang terhormat, akan mendirikan negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan negara persatuan.⁸

Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lain. Meskipun negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan lain itu, akan tetapi golongan agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara. Oleh karena itu, cita-cita negara Islam itu tidak sesuai dengan cita-cita

⁸ *Ibid.*, hlm. 411,



negara persatuan yang telah diidam-idamkan oleh kita semuanya dan juga yang dianjurkan oleh pemerintah.⁹

Meskipun demikian perjalanan panjang hingga terbentuknya Piagam Jakarta masih dalam tanggung jawab panitia persiapan kemerdekaan (PPKI) dan persiapan-persiapan menjelang kemerdekaan melalui rapat-rapat khusus seksi ketatanegaraan, terutama mempersiapkan Undang undang dasar dan pembukaannya terus berlanjut hingga tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses menuju kearah itu, kontraversi terkait Piagam Jakarta masih terus ada.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Mohammad Hatta didatangi oleh seorang perwira angkatan laut yang mengaku membawa aspirasi masyarakat Indonesia bagian timur (yang mayoritas Kristen dan katolik) yang keberatan dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Selanjutnya dikatakan bahwa jika tidak dipertimbangkan kembali, maka Indonesia bagian timur tidak akan mau bergabung dengan negara Indonesia. Sebetulnya desakan demikian pernah disampaikan oleh salah seorang tokoh dari Maluku yaitu Mr. Latuharhary yang memprotes Piagam Jakarta dalam sidang BPUPKI. Bahkan Soekarno dan Wachid Hasyim membela Piagam Jakarta. Termasuk Ki Bagus Hadikusumo pun bersikeras untuk mempertahankan tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu. Namun berkat upaya dari Kusman Singodimedjo yang mendekati wakil-wakil Islam sajalah akhirnya kelompok Islam bisa menerima dihapusnya tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu.¹⁰

⁹ Moh. Hatta, *Menuju Negara Hukum*, Penerbit Yayasan Idayu, Jakarta 1975, hlm 16.

¹⁰ Ahmad Mansur Suryanegara, *API Sejarah 2*, (Bandung : PT Grafindo Media Pratama 2010) hlm. 165.



B. Pembatasan Masalah.

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan meluasnya masalah dalam pembahasan, maka permasalahan dibatasi pada Perdebatan Soekarno dengan Ulama dalam merumuskan dasar Negara.

C. Rumusan masalah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, maka hal yang menjadi rumusan permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perdebatan Soekarno dengan Ulama dalam merumuskan dasar negara?
2. Bagaimana hasil dari perdebatan antara soekarno dengan ulama dalam merumuskan dasar Negara?

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian.

1. Agar mengetahui Perdebatan Soekarno dengan Ulama dalam merumuskan dasar negara.
2. Agar mengetahui hasil dari perdebatan antara soekarno dengan ulama dalam merumuskan dasar Negara.

E. Tinjauan Pustaka.

Ketokohan Soekarno begitu melegenda sebagai proklamator dan pemimpin besar Indonesia. Namanya tetap menjadi yang terdepan, dicintai oleh rakyat, dibela oleh para loyalisnya, dan diakui oleh Barat sebagai pemimpin yang konsisten dengan perjuangan anti-kapitalisme dan anti-kolonialisme. Sosok Soekarno mempunyai magnet yang besar, pidato-pidatonya begitu menggelagar dan menggelorakan semangat nasionalisme. Ia adalah sosok karismatik yang takakan pernah tergantikan. Soekarno yang oleh banyak kalangan dianggap sebagai tokoh dan pemimpin besar negeri ini, sehingga amat wajar dan cukup beralasan jika segala pemikiran Soekarno dijadikan referensi dalam berbagai pembahasan.



Namun yang tidak kalah penting adalah bahwa pemikiran-pemikiran yang muncul dari Soekarno adalah selalu menarik, sehingga marak dikaji oleh banyak orang. Sejauh penelusuran data yang penulis lakukan, sudah ada sejumlah karya penelitian yang membahas tentang Soekarno. Sebagian besar buku-buku sejarah pergerakan nasional Indonesia memuat uraian dan pembahasan tentang Soekarno. Karya-karya di bawah ini juga memuat pembahasan tentang Soekarno.

1. Ahmad Mansur Surya Negara, API Sejarah 2 merupakan jilid ke 2 dari buku nasional *besseller* api sejarah yang mengungkapkan fakta tersembunyi tentang mahakarya ulama dan bukti keaslian riwayat sejarah dan tokoh-tokoh pahlawan Nasional sejak zaman periode jepang hingga zaman kemerdekaan.
2. Soeri Soeroto, Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi, buku ini merupakan buku yang menyadarkan pentingnya sejarah Indonesia baik itu sebelum maupun sesudah Revolusi yang berisi tentang karya sejarah dari masa sebelum Revolusi, mengakui sejarah dengan Otobiografi dan karya sejarah dari masa sesudah Revolusi, mencari sumber baru dalam sejarah pada abad ke 20 yaitu polemik tentang Soekarno dan pendekatan Soekarno terhadap ulama secara mendasar sekaligus terperinci.
3. Taufik Adi Susilo, Soekarno: Biografi Singkat 1901-1970 Buku ini ingin menghadirkan kembali sosok Soekarno beserta plus dan minusnya. Soekarno sebagai sosok yang menjadi pujaan, akhir perjalanannya tidak menyenangkan dan bahkan ironis. Sebagai bapak pendiri bangsa, Soekarno harus menghadapi realitas dan rivalitas politik yang sangat menyakitkan, dan harus berakhir pada ironi kehidupan yang sangat menyedihkan.

Dibuang, diperas, ditendang dan dicampakkan begitu saja oleh penguasa orde baru harus ia terima hingga akhir menjelang. Tidak ada penghormatan selayaknya kepada sisi manusiawi Soekarno yang tengah dilanda penyakit yang begitu akut hingga ajal menjemputnya; tidak ada penghormatan terhadap sisi perjuangan dan sumbangsihnya yang teramat besar bagi kemerdekaan negeri ini dari kolonialisme dan imperialisme, dan kenyataannya ia harus jatuh ke lubang kehinaan akibat intrik politik yang sangat tendensius, hingga akhir



hayatnya pun harus berpulang dalam ketiadaan respek terhadap bapak pendiri bangsa. Buku di atas menurut penulis dibahas lebih terfokus pada aspek pemikiran politik dan perjuangan Soekarno, sementara aspek pemikiran keagamaan belum banyak diungkap dalam buku-buku ini. Buku yang membahas aspek pemikiran, Taufik Adi Susilo, Soekarno: Biografi Singkat. keagamaan Soekarno, di antaranya: Cindy Adams, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia, Buku ini mengungkapkan latar belakang pribadi dan perjuangan Soekarno. Buku ini juga mengungkapkan bagaimana agama dan keberagaman orang tua Soekarno banyak mempengaruhi agama dan keberagamaannya.

F. Kerangka pemikiran.

Menurut Ahmad Mansur Suryanegara, sepanjang perjuangannya dalam mengamati sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia menemukan satu kesimpulan :” Dasar negara adalah dasar ideologis negara, merupakan hal yang sangat mutlak bagi setiap negara. Untuk sebuah negara baru yang akan didirikan, hal yang paling penting diputuskan terlebih dahulu adalah mengenai, ”apa dasar Negara baru yang akan didirikan?”, karena masalah dasar negara akan menentukan isi dari Undang-Undang Dasar negara tersebut.

Dalam teori perang *Carl von Clausewitz, On War* bahwa perang melahirkan kondisi tanpa ada kepastian dan tidak mudah diduga menjadikan setiap orang dihinggapi rasa takut. Timbulnya upaya memperkuat keyakinan dirinya atau moral staminanya. Upaya ini, terutama dilakukan para komandan perang karena kemenangan salah satu faktor penentunya, sangat bergantung pada karakter dan bakat dari komandan.

Untuk itu, dari hasil perdebatan dalam rangkaian sidang-sidang BPUPKI tersebut jelas, bahwa soal dilematik belum terselesaikan. Pada satu sisi kalangan Islam mengusung Islam sebagai dasar negara dalam sidang-sidang BPUPKI dan ingin melaksanakan seluruh isi syariat Islam yang ada tanpa suatu reformulasi yang tuntas.



G. Metode dan sumber penelitian.

Dalam merekonstruksi peristiwa atau kejadian masa lampau diperlukan sebuah metode atau langkah-langkah, salah satunya adalah metode historis, yang mana tujuan dari penulisan ini untuk menghasilkan hasil yang sistematis dan objektif. Dalam laporan penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam penulisan laporan penelitian, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Tahapan heuristik.

Tahapan heuristik atau pengumpulan sumber sejarah yaitu proses mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah yang dapat dijadikan bahan penelitian. Sedangkan sumber tersebut dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber penelitian dalam mengumpulkan data penulis mencari sumber di perpustakaan 400, perpustakaan Sumber kab. Cirebon, perpustakaan IAIN Syekh Nurjati kota Cirebon Buku-buku milik. Ibu Ratna Puspitasari, dan buku-buku milik pribadi.¹¹

2. Tahapan verifikasi atau kritik.

Tahapan kritik atau analisa yaitu tahapan di mana setelah data-data yang sudah terkumpul, maka diadakan penyeleksian terhadap data tersebut dengan cara mengkritik dan menganalisa data yang sudah ada baik intern maupun ekstern. Kritik intern menelusuri tentang kebenaran sumber (kredibilitas), sedangkan keabsahan tentang keaslian sumber (otentisitas) ditelusuri melalui kritik ekstern. Hal ini dilakukan agar diperoleh data yang otentik kredibel.¹²

3. Tahapan interpretasi.

¹¹Soeri Soeroto, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005), hlm. 39.

¹²*Ibid.*, hlm. 40.



Tahapan yang ketiga ini adalah tahapan yang menginterpretasikan terhadap data yang telah dikritik tadi dapat memberikan penafsiran dengan cara menghubungkan fakta-fakta yang telah diperoleh, sehingga menjadi kronologi sejarah yang logis.¹³

4. Tahapan Historiografi.

Tahapan Historiografi yaitu tahapan penelusuran, yang mana dalam langkah ini akan menitik beratkan kepada hasil-hasil ketiga tahapan yang ada diatas. Dengan mengungkapkan dan memaparkan sumber-sumber sejarah yang diperoleh dan dalam bentuk tulisan yang mudah dipahami.¹⁴

H. Sistematika penulisan

Penelitian ini direncanakan terdiri dari lima bab.

Bab I berisi pendahuluan dengan rincian sebagai berikut: Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan dan kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka pemikiran, Metode dan sumber penelitian, Sistematika penulisan.

Bab II Berisi tentang Kondisi bangsa Indonesia sebelum sidang BPUPKI meliputi A. Masa sebelum sidang BPUPKI B. Terbentuknya panitia sembilan.

Bab III Konsep Negara menurut Soekarno dan para ulama dalam merumuskan dasar Negara dengan meliputi A. Konsep Soekarno Tentang Negara B. Konsep Ulama Tentang Negara.

Bab IV dengan sub pokok bahasan, proses perdebatan dan hasil perdebatan Soekarno dengan Ulama

Bab V penutup dengan pembahasan: kesimpulan dan saran.

¹³Ahmad Mansur Suryanegara, *API Sejarah 2*, (Bandung : PT Grafindo Media Pratama 2010) hlm.158 .

¹⁴*Ibid.*, hlm.,159.



- Perlunya penambahan referensi dalam sejarah Soekarno dan ulama dan mengetahui apa saja sejarah ulama yang belum diketahui.
- Untuk mengoptimalkan pembelajaran sejarah Indonesia khususnya sejarah Soekarno dan Ulama.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah, *Sejarah pendidikan Islam di Indonesia*, (Rajawali Press, Jkarta 1995).
- LAPIDUS IRA. M., *sejarah sosial umat islam*, (Jakarta: PT Raja grafindo persada, 1999).
- Amin Samsul munir, *sejarah peradaban Islam*, (Jakarta: Amzar, 2010).
- Samsul Nizar, *sejarah pendidikan islam*, (Jakarta: Putra Grafika, 2013).
- Zuhairi, *sejarah pendidikan islam*, (Jakarta: Bumi aksara, 2013).
- Bosworth. C.E., *Dinasti-Dinasti Islam*, Terj. Ilyas Hasan, Bandung: MIZAN, 1980.
- Syalabi. Ahmad, Jilid 3, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, Terj. Muhammad Labib Ahmad, Jakarta: PT. Pustaka Al Husna Baru, 2008.
- Ricard Bell, TaufikAdnan Amat, PT. Raja GrafindoPersada, 1995.
- Simanjutak Hamonangan, 100 Tokoh yang Mengubah Indonesia, PT. Buku Kita 2005.
- Suryanegara Ahmad Mansur, API Sejarah 2, PT Grafindo Media Pratama 2014.
- Soeroto Soeri, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2005).
- Hatta Moh., *Menuju Negara Hukum*, Penerbit Yayasan Idayu, Jakarta 1975.
- Sastrawijaya Safiyudin, *Sekitar Pancasila, Proklamasi dan Konstitusi*, Penerbit Alumni Bandung, 1980.
- John A. Titaley, *Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pembukaan UU 1945*, diterbitkan oleh Fakultas Teologi UKSW-Salatiga, 1999.
- Kusuma, RM. A. B., *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Depok: Badan PenerbitFakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Maarif, Ahmad Syafii, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, Jakarta: LP3ES, 1987.
- Ricklefs, M. C., *Sejarah Indonesia Modern 1200—2004*, Jakarta: Serambi, 2007.



Suhatno, dkk., Tokoh-Tokoh Pemikir Paham Kebangsaa, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995.

Yamin, Muhammad, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 Jilid I, Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959.

Chaniago A. B., JR. (ed.), Di Bawah Pendudukan Jepang: Kenangan Empat Puluh Dua Orang Yang Mengalaminya, Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia, 1988.

Makmur, Johan, Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Noer, Deliar, Gerakan Moderen Islam di Indonesia: 1900—1942, Jakarta: LP3ES, 1996.

Yunarti, D. Rini, BPUPKI, PPKI, Proklamasi Kemerdekaan RI, Jakarta : Penerbit Buku Kompas, 2003

Natsir, Mohammad., Islam Sebagai Dasar Negara: Bandung: Sekar Langit 2014.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang